

SPIRITUAL AUTHORITY AND POLITICAL ADAPTATION: SUFISM IN INDONESIA'S NEW ORDER ERA (1966–1998)

Muhammad Husein

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

Email: husinmuhammad99@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 1 Bulan : Januari Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This article examines the complex and dynamic relationship between Sufism and state power during Indonesia's New Order period. It argues against the prevailing notion that Sufi orders (tarekat) were apolitical or merely retreatist spiritual movements. Instead, the study demonstrates how various tarekat, particularly the Qadiriyya wa Naqsyabandiyya (TQN), underwent significant processes of rationalization, bureaucratization, and political engagement. Through a historical-sociological analysis of primary and secondary literature, the article traces the transformation of Sufism from a primarily rural, charismatic-based tradition into a modern socio-political force. Key findings reveal a pattern of state co-optation, where the regime sought to harness the mass following of the tarekat for developmental legitimacy and political stability. Concurrently, Sufi leaders navigated the political landscape with diverse strategies ranging from active collaboration with the ruling Golkar party, to opposition through Islamic parties, to deliberate neutrality. This period also witnessed the rise of charismatic "living saints" (wali) whose spiritual authority was leveraged for political mobilization. Ultimately, the New Order era was not a period of Sufi decline but one of profound adaptation, where mystical Islam actively negotiated its place within an authoritarian modernizing state, leaving a lasting legacy on Indonesia's religious and political topography.</i></p> <p>Keyword: Sufism, Tarekat, New Order, Political Islam, Spiritual Authority, Indonesia.</p>
Abstrak	<p><i>Artikel ini mengkaji hubungan yang kompleks dan dinamis antara Sufisme dan kekuasaan negara selama periode Orde Baru di Indonesia. Studi ini menyanggah anggapan umum yang menyatakan bahwa ordo Sufi (tarekat) bersifat apolitis atau sekadar gerakan spiritual yang menarik diri dari duniawi (retreatist). Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bagaimana berbagai tarekat, khususnya TQN (Tarekat Qadiriyya wa Naqshbandiyya), mengalami proses rasionalisasi, birokratisasi, dan keterlibatan politik yang signifikan. Melalui analisis historis-sosiologis terhadap literatur primer dan sekunder, artikel ini menelusuri transformasi Sufisme dari tradisi berbasis karismatik pedesaan menjadi kekuatan sosial-politik modern. Temuan utama mengungkapkan pola kooptasi negara, di mana rezim berusaha memanfaatkan basis massa tarekat demi legitimasi pembangunan dan stabilitas politik. Secara bersamaan, para pemimpin Sufi (mursyid, kyai) menavigasi lanskap politik dengan beragam strategi, mulai dari kolaborasi aktif dengan partai penguasa (Golkar), oposisi melalui partai-partai Islam, hingga netralitas yang disengaja. Periode ini juga menyaksikan munculnya sosok "wali kontemporer" yang otoritas spiritualnya dimanfaatkan untuk mobilisasi politik. Pada akhirnya, era Orde Baru bukanlah masa kemunduran bagi Sufisme, melainkan periode adaptasi yang mendalam, di mana Islam mistis secara aktif menegosiasikan posisinya di dalam negara modern yang otoriter, yang kemudian meninggalkan warisan abadi pada topografi religi dan politik di</i></p>

Indonesia.

Kata Kunci: Sufisme, Tarekat, Orde Baru, Islam Politik, Otoritas Spiritual, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Studi tentang Islam di Indonesia modern sering kali dibingkai dalam dikotomi antara reformisme "modernis" yang diasosiasikan dengan aktivisme sosial-politik perkotaan dan "tradisionalisme" yang dipandang bersifat perdesaan, pasif, dan berorientasi pada ritual. Dalam skema ini, Sufisme (tasawuf) serta ekspresi institusionalnya, yakni tarekat, kerap diposisikan ke dalam ranah privat kesalehan personal, mistisisme, dan pengejaran ukhrawi, yang dianggap terputus dari intrik kekuasaan dan diskursus politik (Geertz, 1960). Era Orde Baru (1966–1998) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, yang dicirikan oleh depolitisasi paksa, pembangunan ekonomi yang pesat, dan kecurigaan mendalam rezim terhadap Islam politik, menjadi kasus kritis untuk menguji kembali asumsi tersebut.¹

Berlawanan dengan narasi marginalisasi, bukti-bukti menunjukkan bahwa Sufisme tidak hanya bertahan tetapi juga berevolusi secara signifikan selama periode ini. Proyek modernisasi Orde Baru, meskipun secara lahiriah bersifat sekuler dan teknokratis, secara tidak sengaja menciptakan ruang bagi ekspresi keagamaan yang dianggap bersifat devosional pribadi dan tidak mengancam secara sosial. Sufisme, dengan penekanan pada spiritualitas batin dan disiplin moral, tampak memenuhi kriteria ini. Namun, memandang hubungan antara negara Orde Baru dan Sufisme hanya sebatas toleransi terhadap spiritualitas apolitis berarti mengabaikan kompleksitas yang mendalam di dalamnya. Artikel ini berargumen bahwa periode Orde Baru merupakan epos krusial bagi negosiasi aktif dan transformasi dalam hubungan antara Sufisme dan kekuasaan politik.²

Pada level makro, Orde Baru mengawasi pergeseran sosiologis yang luas dari orientasi keagamaan sinkretis (abangan) menuju praktik Islam yang lebih ortodoks dan berorientasi syariat (santri). Proses "santrinisasi" masyarakat ini menyediakan lahan subur bagi ekspansi tarekat, yang sering kali berfungsi sebagai saluran transformasi keagamaan, khususnya di pedesaan Jawa. Represi negara terhadap partai politik Islam yang terjadi secara simultan dengan upaya merangkul dukungan sosio-kultural Muslim menciptakan ekonomi politik unik,

¹ Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. University of Chicago Press

² Howell, Julia. (2001). Sufism and the Indonesian Islamic Revival. *The Journal of Asian Studies*. 60. 10.2307/2700107.

di mana otoritas spiritual dapat dikonversi menjadi modal sosial dan, pada gilirannya, menjadi pengaruh politik.³

Artikel ini mempersempit fokusnya dari konteks umum tersebut ke dinamika spesifik dan saling terkait yang mendefinisikan keterlibatan politik Sufisme. Pertama, studi ini mengeksplorasi birokratisasi dan institusionalisasi tarekat, mengkaji bagaimana jaringan karismatik yang cair diformalkan menjadi organisasi modern seperti Jam'iyah Ahlith Thariqah al-Mu'tabarrah (JATM). Proses ini tidak terlepas dari arus politik, yang menyebabkan perpecahan antara JATMI (yang bersekutu dengan partai pemerintah, Golkar) dan JATMAN (yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama dan kendaraan politiknya, PPP). Kedua, artikel ini menganalisis strategi politik yang berbeda dari para pemimpin Sufi, dengan menggunakan kasus paradigmatis TQN di Jawa Timur. Perbedaan jalur antara Kyai Musta'in Romly (kolaborasi dengan Golkar), Kiai Adlan Ali (oposisi melalui PPP), dan Kyai Usman al-Ishaqi (netralitas strategis) mengilustrasikan rentang ijtihad para mursyid dalam merespons kekuasaan negara. Ketiga, artikel ini menyelidiki fenomena neo-Sufisme sebagai etika pembangunan, yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh seperti Abah Anom dari TQN Suryalaya. Model ini menunjukkan Sufisme yang terlibat secara pragmatis dengan negara dalam isu rehabilitasi sosial, pendidikan, dan lingkungan hidup, merumuskan "politik kebajikan" (politics of virtue) yang mencari pengaruh moral tanpa keterlibatan partisan langsung. Terakhir, studi ini mempertimbangkan ketahanan otoritas karismatik melalui kemunculan tak terduga sosok "wali kontemporer" yang heterodoks pada tahun 1990-an, yang prestise spiritualnya diambil alih oleh aktor politik seperti Abdurrahman Wahid untuk mobilisasi elit.⁴

Dengan menelusuri alur dari iklim sosio-religius umum hingga manuver politik spesifik di dalam dan di sekitar ordo Sufi, artikel ini menyanggah penggambaran simplistik tentang posisi Sufisme dalam politik modern. Artikel ini berargumen bahwa era Orde Baru memperlihatkan Sufisme bukan sebagai peninggalan masa lalu, melainkan sebagai tradisi yang serbaguna dan adaptif yang mampu melakukan keterlibatan canggih dengan kekuasaan

³ Madinier, Remy. (2002). *Civil Islam : Muslims and Democratization in Indonesia*, Robert W. Hefner: Princeton (New Jersey) : Princeton University Press, 2000, 286 p.. Moussons. 160-162. 10.4000/moussons.2633.

⁴ Turmudi, Endang. (2007). *Struggling for the Umma: Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*. 10.22459/SU.10.2006.

negara modern, serta membentuk lanskap spiritual maupun kontur politik Indonesia kontemporer.⁵

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis historis-sosiologis dan studi kasus komparatif. Metode penelitian berbasis literatur digunakan untuk mengkaji secara kritis karya-karya ilmiah, dokumen historis, dan sumber-sumber primer yang berkaitan dengan Sufisme selama era Orde Baru di Indonesia. Metodologi ini melibatkan pengumpulan dan analisis sistematis terhadap berbagai sumber, termasuk artikel jurnal akademik, buku, disertasi doctoral, catatan sejarah, serta dokumen institusional baik dari ordo Sufi maupun badan-badan pemerintah.⁶

Proses penelitian dimulai dengan tinjauan pustaka yang komprehensif dan triangulasi sumber untuk menetapkan akurasi faktual serta pemahaman kontekstual. Sumber primer meliputi dokumen organisasi dari JATMI dan JATMAN, catatan historis tarekat TQN di Jawa Timur, serta karya-karya yang diterbitkan oleh tokoh-tokoh kunci Sufi. Sumber sekunder mencakup analisis akademik dari para pakar terkemuka, termasuk Martin van Bruinessen, Julia Day Howell, Endang Turmudi, Nur Syam, serta peneliti kontemporer lainnya di bidang ini. Metode studi kasus komparatif memungkinkan analisis mendalam terhadap berbagai respons Sufi terhadap tekanan politik, dengan fokus khusus pada tarekat TQN di Jawa Timur (Rejoso, Cukir, dan Kedinding) sebagai kasus representatif dari berbagai adaptasi politik yang berbeda.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang berulang dalam hubungan antara ordo Sufi dan kekuasaan politik. Hal ini mencakup pemeriksaan mekanisme kooptasi negara, proses birokratisasi institusional, dan variasi respons kepemimpinan terhadap konstrain politik. Studi ini menerapkan periodisasi historis untuk menelusuri evolusi hubungan Sufi-negara sepanjang era Orde Baru, dengan tetap berfokus pada titik-titik balik penting seperti Pemilu 1977, Muktamar NU 1979, dan pergeseran politik pada awal 1990-an.⁷

CELAH PENELITIAN DAN PERBEDAAN DENGAN STUDI SEBELUMNYA

Tinjauan terhadap literatur yang ada menunjukkan sejumlah celah penelitian yang

⁵ Azra, Azyumardi. (2014). *NU: Islam Tradisional dan Modernitas di Indonesia*. Studia Islamika. 4. 10.15408/sdi.v4i4.770.

⁶ Kuntowijoyo, . (2003). *Metodologi Sejarah* (Edisi Kedua). Yogyakarta: Tiara Wacana.

⁷ Bruinessen, M. van. (1994). *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta

signifikan dalam kajian mengenai politik tarekat. Pertama, terdapat ketimpangan dalam eksplorasi dinamika urban-rural; meskipun politik tarekat berbasis perdesaan telah didokumentasikan secara luas, adaptasi Sufisme di pusat-pusat metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung selama era Orde Baru masih kurang mendapatkan perhatian mendalam di luar interaksi elit. Selain itu, dimensi gender dalam jaringan politik Sufi cenderung terabaikan karena fokus akademis yang sangat dominan pada kepemimpinan laki-laki, sehingga kontribusi informal namun krusial dari tokoh perempuan dalam struktur tarekat belum banyak tereksplorasi. Celah lainnya berkaitan dengan keberlanjutan trayektori pasca-1998, di mana banyak studi menghentikan analisisnya pada runtuhnya Orde Baru tanpa menelusuri bagaimana konfigurasi politik-Sufi tersebut berevolusi atau bertransformasi dalam iklim demokrasi Reformasi. Lebih lanjut, dimensi ekonomi dari hubungan Sufi-negara, termasuk jaringan finansial dan ekonomi patronase yang menopang hubungan tersebut, serta kurangnya perspektif regional komparatif di luar Pulau Jawa, menambah daftar panjang aspek yang perlu diteliti lebih lanjut guna mendapatkan gambaran sosio politik yang lebih utuh.⁸

Tulisan ini memiliki sejumlah perbedaan substantif dengan studi-studi sebelumnya. Meskipun kerangka kerja Martin van Bruinessen memberikan pemahaman dasar yang kuat mengenai relasi Sufi-negara, studi ini mensintesis dan memperluas analisis tersebut dengan mengintegrasikan beasiswa pasca-2000 yang meninjau dinamika Orde Baru dengan jarak historis dan lensa teoretis yang lebih mutakhir, terutama pada penekanan terhadap agensi dan mikro politik dalam tarekat. Perbedaan lain terletak pada rekonseptualisasi neo-Sufisme; jika studi awal cenderung membingkai keterlibatan Sufi hanya sebagai strategi elektoral atau politik patronase, penelitian terbaru mulai melihatnya sebagai "etika pembangunan" yang lebih menekankan pada rehabilitasi sosial dan pengembangan moral. Hal ini juga menggeser pemahaman dari respons politik yang bersifat biner (kolaborasi versus oposisi) menuju spektrum yang lebih plural, seperti "akomodasi kritis" atau netralitas strategis yang diperlihatkan oleh faksi Kedinding.⁹

Lebih jauh lagi, terdapat evaluasi ulang terhadap fenomena "wali" kontemporer yang kini dikaji lebih kritis melalui instrumen politiknya, dibandingkan sekadar ketertarikan

⁸ Howell, Julia. (2001). Sufism and the Indonesian Islamic Revival. *The Journal of Asian Studies*. 60. 10.2307/2700107.

⁹ Steenbrink, Karel. (2011). Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. *Survei Historis, Geografis dan Sosiologis (The Naqsyabandiyah Brotherhood in Indonesia: A Historical, Geographical and Sociological Survey)*. By Martin van Bruinessen. Bandung: Mizan, 1992. Pp. 242. [In Indonesian.]. *Journal of Southeast Asian Studies*. 25. 421-423. 10.1017/S002246340001359X.

antropologis belaka. Ketegangan antara otoritas organisasional-birokratis dengan otoritas karismatik yang menetap juga menjadi fokus baru yang membedakan studi kontemporer dengan analisis formalistik masa lalu. Penelitian terkini juga mulai memposisikan Sufisme Indonesia dalam jaringan transnasional yang lebih luas, melampaui batas-batas nasional yang menjadi ciri studi-studi awal. Terakhir, diversifikasi metodologis yang menggabungkan analisis jaringan dan kerangka interdisipliner dari ilmu politik dan sosiologi menawarkan pemahaman yang lebih bernuansa mengenai dinamika kekuasaan, aliran sumber daya, dan modal sosial dalam jaringan politik-Sufi di Indonesia.¹⁰

Penelitian ini mengisi beberapa celah literatur tersebut dengan menyediakan analisis sintesis yang menjembatani beasiswa historis dan kontemporer, sembari menyoroti dimensi-dimensi yang selama ini kurang dikaji seperti adaptasi urban, jaringan ekonomi, dan kontinuitas pasca-1998¹¹. Dengan membandingkan secara sistematis berbagai strategi politik faksi-faksi TQN dalam konteks sosio-politik spesifik mereka, studi ini menawarkan pemahaman yang lebih granular mengenai bagaimana otoritas spiritual dinegosiasikan, dikonversi, dan dikontestasikan di dalam negara pembangunan yang otoriter. Lebih jauh lagi, penelitian ini memperluas lini masa analisis untuk mempertimbangkan bagaimana konfigurasi era Orde Baru meletakkan dasar bagi persinggungan kontemporer antara Sufisme, politik, dan kehidupan publik di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Birokratisasi Otoritas Spiritual: Dari Jaringan Karismatik menuju Organisasi Formal

Periode Orde Baru menjadi saksi transformasi signifikan dalam struktur dan operasional tarekat, yang bergeser dari jaringan karismatik cair yang berpusat pada individu mursyid menuju organisasi terstruktur secara formal dengan aparatur birokrasi. Proses ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan sarat akan muatan politik yang mencerminkan tekanan negara sekaligus adaptasi internal. Pembentukan Jam'iyah Ahlith Thariqah al-Mu'tabarrah (JATM) pada tahun 1957, yang kemudian terpecah menjadi JATMI (berafiliasi dengan Golkar) dan JATMAN (berafiliasi dengan NU/PPP), merupakan contoh nyata dari evolusi institusional ini.

¹⁰ Turmudi, Endang. (2007). *Struggling for the Umma: Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*. 10.22459/SU.10.2006.

¹¹ Bruinessen, M.V., & Howell, J.D. (2007). *Sufism and the 'Modern' in Islam*.

Preferensi negara untuk berinteraksi dengan organisasi formal yang hierarkis daripada jaringan spiritual yang tersebar menciptakan insentif kuat bagi birokratisasi. Sebagaimana dicatat oleh Bruinessen (1994), rezim Orde Baru menganggap sangat menguntungkan secara strategis untuk terlibat dengan Sufisme melalui saluran institusional yang dapat diidentifikasi, dipantau, diatur, dan berpotensi untuk dikooptasi. Formalisasi organisasi ini melayani dua kepentingan: bagi negara, hal ini membuat Islam mistis lebih "terbaca" (legible) dan terkendali; bagi tarekat, hal ini menyediakan mekanisme perlindungan, perolehan sumber daya, dan perluasan pengaruh sosial.¹²

Namun, proses birokratisasi ini memicu ketegangan internal yang membentuk trajektori politik Sufisme sepanjang era tersebut. Struktur organisasi formal sering kali berbenturan dengan otoritas kharismatik tradisional sang mursyid, menciptakan apa yang disebut Weber sebagai ketegangan antara otoritas karismatik dan birokrasi. Kasus TQN Rejoso di bawah kepemimpinan Kyai Musta'in Romly mengilustrasikan dinamika ini dengan jelas. Posisi formal Musta'in sebagai ketua JATM memberinya daya tawar institusional dan akses ke patronase negara, namun keputusan kontroversialnya untuk bersekutu dengan Golkar pada akhirnya menggerus otoritas spiritualnya di mata pengikut tradisional, yang berujung pada keretakan jaringannya.¹³

Lanskap politik Orde Baru memaksa para pemimpin Sufi untuk menavigasi medan yang kompleks, yang menghasilkan tiga pola keterlibatan berbeda yang mencerminkan orientasi ideologis maupun kalkulasi pragmatis.

Pertama, aliansi Kyai Musta'in Romly dengan Golkar merepresentasikan bentuk akomodasi politik yang paling langsung. Strategi ini didasarkan pada kalkulasi rasional bahwa keterlibatan dengan partai penguasa akan menghasilkan keuntungan nyata: perlindungan dari pengawasan negara, akses ke sumber daya pembangunan, dan peningkatan status sosial. Pendirian Universitas Darul Ulum, yang didanai melalui jaringan patronase yang terhubung dengan negara, mencontohkan imbalan materiil dari pendekatan ini. Namun, sebagaimana dicatat Turmudi (1995), kolaborasi ini harus dibayar mahal. Musta'in menghadapi oposisi

¹² Bruinessen, M. van. (1994). *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta

¹³ Turmudi, E. (1995). Religion and Politics: A Study on Political Attitudes of Devout Muslims and the Role of the Kyai in Contemporary Java. *Asian Journal of Social Science*, 23(2), 18-41. <https://doi.org/10.1163/030382495X00105>

keras dari lingkaran NU dan mengalami desersi massal dari pengikut spiritualnya, yang menunjukkan bahwa pragmatisme politik dapat mengikis legitimasi keagamaan.¹⁴

Kedua, sebaliknya, keberpihakan Kiai Adlan Ali pada PPP merepresentasikan strategi perlawanan melalui struktur politik-keagamaan yang ada. Dengan mempertahankan loyalitas kepada NU dan kendaraan politiknya, Adlan memposisikan dirinya sebagai penjaga nilai-nilai Islam tradisional melawan kekuatan negara yang melakukan sekularisasi. Pendekatan ini menjaga kredibilitas keagamaannya di lingkungan tradisional, namun membatasi aksesnya terhadap sumber daya negara dan membuatnya rentan terhadap tekanan rezim. Pengalaman faksi Cukir menunjukkan bagaimana politik Sufi yang oposisional dapat mempertahankan kohesi komunitas dan autentisitas spiritual meskipun beroperasi di bawah konstrain struktural yang signifikan.¹⁵

Ketiga, Faksi Kedinding di bawah Kyai Usman al-Ishaqi mengembangkan pendekatan ketiga yang dicirikan oleh jarak strategis dari politik partisipan sambil tetap menjaga hubungan kooperatif dengan otoritas negara. "Akomodasi kritis" ini memungkinkan keterlibatan praktis dengan pemerintah dalam isu-isu spesifik (khususnya layanan sosial dan pengembangan masyarakat) tanpa afiliasi politik formal. Sebagaimana diamati oleh Zamzami dkk. (2022), pendekatan ini memungkinkan pelestarian otonomi spiritual sekaligus menghindari konsekuensi polarisasi dari keterlibatan politik langsung. Model Kedinding menunjukkan bahwa tarekat dapat menjalankan agensi mereka melalui kerja sama selektif daripada sekadar kolaborasi penuh atau oposisi terang-terangan.¹⁶

Neo-Sufisme sebagai Etika Pembangunan: Melampaui Instrumentalisasi Politik

Munculnya apa yang disebut sebagai "neo-Sufisme" mewakili evolusi signifikan dalam keterlibatan Sufi dengan modernitas¹⁷. Tokoh-tokoh seperti Abah Anom dari TQN Suryalaya mengembangkan pendekatan yang melampaui kategori politik konvensional, memposisikan Sufisme sebagai sumber panduan etis bagi pembangunan nasional. Model ini patut dicatat karena beberapa alasan.

Pertama, hal ini mewakili pergeseran dari ketiadaan sikap politik (quietism) maupun keterlibatan partisan. Inisiatif Abah Anom terutama program rehabilitasi narkoba Pondok

¹⁴ Ibid

¹⁵ Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup. Kyai. Jakarta : LP3ES, 1994

¹⁶ Zamzami, M., Mahzumi, F., & A'la, A. (2022). Tarekat and Politics in Indonesia: Contested Authority between Murshids in the Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah in East Java. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 12(2), 187–208. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2022.12.2.187-208>

¹⁷ Hakim, Budi. (2024). Neo-Sufism as a Social Da'wah Paradigm: Addressing Challenges and Transforming Spirituality in Modern Indonesia. *International Journal of Educational Technology and Society*. 1. 14-33. 10.61132/ijets.v1i3.336.

Inabah dan berbagai upaya pelestarian lingkungan menunjukkan bagaimana spiritualitas Sufi dapat berkontribusi pada kemaslahatan publik tanpa posisi politik yang eksplisit. "Politik kebajikan" (politics of virtue) ini memungkinkan keterlibatan substantif dalam isu-isu sosial sambil menjaga jarak kritis dari pertarungan partisan.¹⁸

Kedua, pendekatan ini selaras dengan ideologi pembangunan Orde Baru sambil secara halus menyuntikkannya dengan nilai-nilai spiritual. Dengan membingkai praktik Sufi sebagai sarana untuk membentuk warga negara yang disiplin dan produktif, tokoh-tokoh seperti Abah Anom menemukan khalayak yang reseptif baik di dalam institusi negara maupun masyarakat luas. Penganugerahan penghargaan lingkungan Kalpataru oleh pemerintah kepada Suryalaya mengilustrasikan bagaimana Sufisme pembangunan ini dapat memperoleh pengakuan resmi tanpa harus tunduk secara politik.¹⁹

Ketiga, fokus neo-Sufisme pada pendidikan karakter dan formasi moral menjawab persepsi tentang defisit spiritual dalam proses modernisasi. Sebagaimana diamati Soebardi (1978), model pendidikan Suryalaya mengintegrasikan praktik spiritual tradisional dengan pendekatan pedagogis modern, menciptakan apa yang dapat disebut sebagai "modernitas Sufi" yang menangkal materialisme sekuler sekaligus fundamentalisme agama.

Ketahanan Otoritas Karismatik: Sosok Wali dalam Era Birokrasi

Perkembangan yang paling paradoksal dari Sufisme pada masa akhir Orde Baru adalah kemunculan kembali sosok "wali kontemporer" yang karismatik justru di saat organisasi-organisasi Sufi menjadi semakin terbirokratisasi. Tokoh-tokoh seperti Gus Miek (Hamim Djazuli) dan Mbah Liem (Muslim Rifa'i) merepresentasikan penegasan kembali otoritas spiritual personal yang seolah menentang formalisasi organisasi maupun kontrol negara.²⁰

Para wali ini beroperasi di luar kerangka institusional konvensional, di mana otoritas mereka bersumber dari persepsi atas pencapaian spiritual, bukan dari jabatan formal. Perilaku mereka yang seringkali dianggap heterodoks seperti kebiasaan Gus Miek mengunjungi kelab malam atau pernyataan-pernyataan kriptik Mbah Liem dalam konteks Islam tradisional umumnya akan merusak otoritas keagamaan. Namun, sebagaimana dicatat

¹⁸ Rohimat, Asep. (2021). Sufi Modernis Peran Transformatif Mursyid TQN Suryalaya dalam bidang Pendidikan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup. *ESOTERIK*. 7. 155-170. 10.21043/esoterik.v7i2.12747.

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibrahim, Ibrahim (2018) *Relevansi nilai pendidikan karakter Gus Miek dalam buku Suluk Jalan Terabas Gus Miek karya M. Nurul Ibad dengan tujuan Pendidikan Islam*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

oleh Bruinessen (2008), transgresi tersebut justru memperkuat daya tarik karismatik mereka karena dianggap sebagai simbol transendensi melampaui norma-norma agama biasa.²¹

Utilitas politik dari tokoh-tokoh ini sangatlah krusial. Patronase Abdurrahman Wahid terhadap berbagai sosok wali menunjukkan nilai strategis mereka dalam manuver politik elit.²² Tokoh-tokoh kharismatik ini menyediakan apa yang dapat disebut sebagai "modal spiritual" yang dapat dikerahkan dalam konflik antar-elit, terutama terkait isu sensitif suksesi kepresidenan pada tahun 1990-an. Kemampuan mereka untuk memobilisasi pengikut melalui saluran non-institusional merupakan bentuk pengaruh politik yang mampu melampaui struktur partai maupun kontrol negara. Fenomena ini mengindikasikan batas-batas penahanan birokratis; meskipun negara berhasil memformalkan organisasi tarekat besar, ia tidak dapat menghapuskan bentuk-bentuk otoritas spiritual alternatif yang beroperasi melalui karisma personal.²³

Ekonomi Politik Hubungan Sufi-Negara

Di luar pertimbangan ideologis dan strategis, hubungan antara ordo Sufi dan negara Orde Baru didasari oleh ekonomi politik yang khas. Dimensi ini, yang seringkali kurang ditekankan dalam beasiswa yang ada, mengungkapkan pondasi material dari keterlibatan spiritual-politik.²⁴

Patronase negara beroperasi melalui berbagai saluran: dukungan finansial langsung untuk lembaga pendidikan, akses prioritas ke proyek-proyek pembangunan, perlindungan hukum bagi aktivitas organisasi, serta pengakuan simbolis melalui penghargaan dan kunjungan resmi. Sebagai imbalannya, negara mengharapkan kepatuhan politik, dukungan elektoral (jika relevan), dan peran dalam stabilisasi sosial. Kasus Musta'in Romly sangat ilustratif aksesnya terhadap konsesi tanah dan dana pembangunan secara eksplisit terkait dengan afiliasinya di Golkar dan kemampuannya untuk mendulang suara di pedesaan.²⁵

Sebaliknya, ordo Sufi mengembangkan strategi ekonomi yang menggabungkan sumber-sumber tradisional (sumbangan pengikut, jasa keagamaan) dengan aktivitas kewirausahaan modern dan peluang yang terkait dengan negara. Pengembangan jaringan pusat rehabilitasi oleh Suryalaya, misalnya, menciptakan kapasitas layanan sosial sekaligus keberlanjutan

²¹ van Bruinessen, Martin. (2007). *Saints, Politicians and Sufi Bureaucrats: Mysticism and Politics in Indonesia's New Order*. 10.5040/9780755607983.ch-006.

²² Barton, Greg. (2002). *Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President*

²³ Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta. MARK R. WOODWARD. (1991). *American Ethnologist*. <https://doi.org/10.1525/AE.1991.18.4.02A00310>

²⁴ Turmudi, Endang. (2007). *Struggling for the Umma: Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*. 10.22459/SU.10.2006.

²⁵ MULKHAN, A. M. (1992). *Runtuhnya mitos politik santri* (1, Cet. 1). Yogyakarta: Sipress.

institusional. Dimensi ekonomi ini bukan sekadar aspek sampingan, melainkan faktor fundamental yang membentuk pilihan politik yang tersedia bagi para pemimpin Sufi.²⁶

Implikasi Teoretis: Meninjau Kembali Sufisme dan Politik Modern

Kasus Indonesia selama Orde Baru menantang beberapa asumsi teoretis mengenai agama dan modernitas.

Pertama, hal ini menyanggah narasi sekularisasi yang memprediksi marginalisasi agama mistis dalam masyarakat yang sedang melakukan modernisasi. Alih-alih menarik diri ke kehidupan privat, Sufisme Indonesia terlibat aktif dalam berbagai bentuk dengan kekuasaan politik.²⁷

Kedua, hal ini memperumit teori keterlibatan agama-politik yang hanya menekankan pada resistensi atau akomodasi. Pola tiga arah yang mencakup kolaborasi, oposisi, dan netralitas strategis menunjukkan bahwa aktor agama mampu mengembangkan strategi yang cangguh dan sensitif terhadap konteks yang melampaui binari sederhana.²⁸

Ketiga, koeksistensi antara organisasi birokratis dan otoritas karismatik menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu menghapuskan bentuk kepemimpinan agama tradisional, melainkan dapat menciptakan konteks baru bagi ekspresi dan pemanfaatan politiknya.²⁹ Akhirnya, konsep "neo-Sufisme" sebagai etika pembangunan menunjukkan adanya modernitas alternatif yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan pembangunan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya menantang pembangunanisme sekuler sekaligus alternatif politik Islamis.³⁰

D. KESIMPULAN

Hubungan antara Sufisme dan kekuasaan politik selama era Orde Baru di Indonesia dicirikan oleh kompleksitas yang luar biasa dan inovasi adaptif. Alih-alih terpinggirkan oleh proses modernisasi, ordo-ordo Sufi justru mengembangkan beragam strategi untuk

²⁶ Rohimat, Asep. (2021). Sufi Modernis Peran Transformatif Mursyid TQN Suryalaya dalam bidang Pendidikan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup. *ESOTERIK*. 7. 155-170. 10.21043/esoterik.v7i2.12747.

²⁷ Asad, T. (2003). *Formations of the secular: Christianity, Islam, modernity*. Stanford University Press. <https://login.eux.idm.oclc.org/login?url=https://www.degruyter.com/books/9780804783095>

²⁸ Bayat, A. (2007). Making Islam democratic: Social movements and the post-Islamist turn. In *Making Islam Democratic*. Stanford University Press.

²⁹ Dale F Eickelman, James Piscatori, (1996). *Muslim politics : with a new preface by the authors*. USA: Princeton University Press.

³⁰ Hakim, B. R. (2023). Tasawuf, Nasionalisme, dan Gerakan Sosial: Studi Spiritualitas Transformasional Abah Sepuh dalam Konteks Kolonialisme dan Kemerdekaan. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(2), 214–226. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v2i2.4761>.

berinteraksi dengan kekuasaan negara, mulai dari penyelarasan politik langsung, penjagaan jarak strategis, hingga penciptaan paradigma pembangunan alternatif.

Proses birokratisasi tarekat, meskipun merupakan respons terhadap tekanan negara, juga menciptakan platform baru bagi pengaruh sosial. Diferensiasi strategi politik yang muncul tidak sekadar mencerminkan perbedaan ideologis, melainkan merupakan kalkulasi pragmatis dalam lingkungan politik yang terkekang. Munculnya neo-Sufisme sebagai etika pembangunan menunjukkan kemungkinan keterlibatan sosial yang substantif tanpa harus terjerat dalam politik partisipan. Sementara itu, bertahannya otoritas karismatik para wali mengungkapkan batas-batas dari penahanan institusional oleh negara.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa Sufisme di Indonesia tidak bersifat apolitis dan tidak pula sekadar di instrumentalisasi oleh aktor-aktor politik. Sebaliknya, Sufisme mengembangkan rasionalitas politiknya sendiri sebuah rasionalitas yang menegosiasikan ketegangan antara otoritas spiritual dan kekuasaan duniawi, antara nilai-nilai tradisional dan institusi modern, serta antara otonomi komunitas dan integrasi negara.

Warisan dari konfigurasi era Orde Baru ini terus membentuk wajah Islam di Indonesia hingga saat ini. Struktur organisasi, pola kepemimpinan, dan strategi politik yang dikembangkan selama periode tersebut telah memberikan dasar bagi komunitas Sufi dalam menavigasi lanskap politik yang lebih terbuka namun tetap kompleks di era pasca-otoritarian. Oleh karena itu, memahami pengalaman historis ini sangat krusial, tidak hanya untuk memahami masa lalu keagamaan Indonesia, tetapi juga untuk mengantisipasi masa depan politik-keagamaan di tanah air.

Analisis ini menyarankan bahwa studi mengenai agama dan politik di masyarakat Muslim akan sangat terbantu dengan perhatian yang lebih besar pada: (1) dimensi ekonomi dari keterlibatan agama-politik; (2) keragaman strategi yang melampaui binari sederhana kolaborasi/perlawanan; (3) ketahanan otoritas karismatik di samping birokratisasi institusional; dan (4) pengembangan kerangka keagamaan yang terlibat secara substantif dengan modernitas sambil tetap menjaga jarak kritis dari kekuasaan negara.

Kasus Indonesia selama Orde Baru pada akhirnya membuktikan bahwa Islam mistis tidak dapat diabaikan sebagai entitas yang tidak relevan secara politik, dan tidak dapat pula direduksi hanya sebagai alat politik. Sebaliknya, Sufisme merepresentasikan modus keterlibatan yang khas dengan kekuasaan sebuah modus yang layak mendapatkan pertimbangan serius, baik dalam analisis akademik maupun pemahaman praktis mengenai peran agama dalam kehidupan politik modern.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asad, T. (2003). *Formations of the secular: Christianity, Islam, modernity*. Stanford University Press. <https://www.degruyter.com/books/9780804783095>
- Azra, A. (2014). NU: Islam Tradisional dan Modernitas di Indonesia. *Studia Islamika*, 4. <https://doi.org/10.15408/sdi.v4i4.770>
- Barton, G. (2002). *Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President*. [Publisher/City].
- Bayat, A. (2007). *Making Islam democratic: Social movements and the post-Islamist turn*. Stanford University Press.
- Bruinessen, M. van. (1994). *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Bruinessen, M. van. (2007). *Saints, Politicians and Sufi Bureaucrats: Mysticism and Politics in Indonesia's New Order*. Dalam *Sufism and the 'Modern' in Islam*. <https://doi.org/10.5040/9780755607983.ch-006>
- Bruinessen, M. V., & Howell, J. D. (2007). *Sufism and the 'Modern' in Islam*. [Publisher].
- Dhofier, Z. (1994). *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Eickelman, D. F., & Piscatori, J. (1996). *Muslim politics: With a new preface by the authors*. USA: Princeton University Press.
- Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. University of Chicago Press.
- Hakim, B. (2024). Neo-Sufism as a Social Da'wah Paradigm: Addressing Challenges and Transforming Spirituality in Modern Indonesia. *International Journal of Educational Technology and Society*, 1, 14-33. <https://doi.org/10.61132/ijets.v1i3.336>
- Hakim, B. R. (2023). Tasawuf, Nasionalisme, dan Gerakan Sosial: Studi Spiritualitas Transformasional Abah Sepuh dalam Konteks Kolonialisme dan Kemerdekaan. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(2), 214–226. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v2i2.4761>
- Howell, J. (2001). Sufism and the Indonesian Islamic Revival. *The Journal of Asian Studies*, 60. <https://doi.org/10.2307/2700107>
- Ibrahim, I. (2018). Relevansi nilai pendidikan karakter Gus Miek dalam buku *Suluk Jalan Terabas Gus Miek* karya M. Nurul Ibad dengan tujuan Pendidikan Islam (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Madinier, R. (2002). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*, Robert W. Hefner:

- Princeton (New Jersey): Princeton University Press, 2000. Moussons, 160-162.
<https://doi.org/10.4000/moussons.2633>
- Mulkhan, A. M. (1992). Runtuhnya mitos politik santri (Cet. 1). Yogyakarta: Sipress.
- Rohimat, A. (2021). Sufi Modernis Peran Transformatif Mursyid TQN Suryalaya dalam bidang Pendidikan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup. *ESOTERIK*, 7, 155-170.
<https://doi.org/10.21043/esoterik.v7i2.12747>
- Steenbrink, K. (2011). Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Survei Historis, Geografis dan Sosiologis (The Naqsyabandiyah Brotherhood in Indonesia). *Journal of Southeast Asian Studies*, 25, 421-423. <https://doi.org/10.1017/S002246340001359X>
- Turmudi, E. (1995). Religion and Politics: A Study on Political Attitudes of Devout Muslims and the Role of the Kyai in Contemporary Java. *Asian Journal of Social Science*, 23(2), 18-41. <https://doi.org/10.1163/030382495X00105>
- Turmudi, E. (2007). Struggling for the Umma: Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java. <https://doi.org/10.22459/SU.10.2006>
- Woodward, M. R. (1991). Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta. *American Ethnologist*. <https://doi.org/10.1525/AE.1991.18.4.02A00310>
- Zamzami, M., Mahzumi, F., & A'la, A. (2022). Tarekat and Politics in Indonesia: Contested Authority between Murshids in the Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah in East Java. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 12(2), 187-208.
<https://doi.org/10.15642/teosofi.2022.12.2.187-208>